

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Landasan Teori.....	11
1. Teori Demokrasi	11
2. Teori Desentralisasi dan Otonomi.....	16
3. Teori Keterwakilan.....	26
4. Teori Pengawasan	32
F. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis penelitian	41
2. Pendekatan penelitian.....	42
3. Objek penelitian	42
4. Bahan Hukum	42
5. Metode Pengumpulan data.....	43
6. Pengolahan dan Penyajian Data Bahan Hukum.....	44
7. Sistematika Penulisan	44

BAB II - TINJAUAN UMUM DPRD DIY	47
A. DPRD DIY	47
1. Sejarah DPRD DIY	47
2. Anggota dewan	56
3. Alat kelengkapan DPRD DIY	59
4. Fraksi-fraksi DPRD DIY	78
B. Pengawasan Dalam Islam	82
1. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam	83
2. Lembaga Pengawasan	95
3. Lembaga Musyawarah	99
BAB III - PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DIY TERHADAP PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DIY	107
A. Pengawasan sebelum adanya UU No. 13 Tahun 2012	109
1. Pengawasan DPRD menurut UU No. 5 Tahun 1974	109
2. Pengawasan DPRD menurut UU No. 22 tahun 1999	114
3. Pengawasan DPRD menurut UU No. 32 Tahun 2004	123
B. Pengawasan setelah adanya UU No. 13 Tahun 2012.....	130
1. Pengawasan DPRD menurut UU No. 23 tahun 2014	130
2. Pengawasan DPRD menurut UU No. 13 Tahun 2012	135
3. Pengawasan DPRD menurut UU No. 17 Tahun 2014	139
4. Peraturan DPRD DIY Tentang Tata Tertib	143
C. Persamaan dan Perbedaan Fungsi Pengawasan DPRD sebelum dan sesudah UU No. 13 tahun 2012	148
D. Mekanisme Fungsi Pengawasan DPRD DIY	150
E. Ruang lingkup pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD DIY	154
F. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksanaan Keistimewaan DIY	159
1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa	160
a. Pansus Pengawasan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	160
2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana	

Keistimewaan	168
a. Pansus Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang di Danai Dengan Dana Keistimewaan.	168
3. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah	171
a. Pansus Tentang Rancangan Keputusan DPRD DIY Tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012.....	171
4. Kendala DPRD DIY dalam melaksanakan pengawasan keistimewaan	176
BAB IV – PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA	182
CURRICULUM VITAE	187